

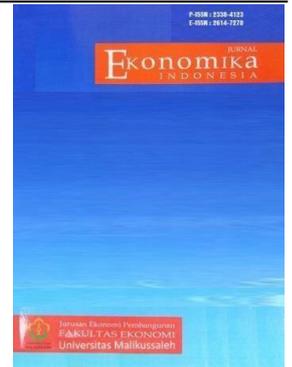
PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH, TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA PADA TAHUN 2017 - 2021

Reza Juanda^{*a}, Muhammad Kahpi Siregar^{*b}

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh*

a Corresponding author :

juanda.reza@unimal.ac.id



ARTICLE INFORMATION ABSTRACT

Keywords:

Poverty, Governmen Expenditure, Open Unemployment Rate, and Local Revenue.

This study examined the influence of government expenditure, open unemployment rate, and local revenue on the poverty rate in North Sumatra Province. This study used the panel data analysis method. Based on the test results, the model selected was a random effect model. Partially, the results showed that government expenditure negatively influenced the poverty rate in North Sumatra, and the open unemployment rate and local revenue did not affect the poverty rate in North Sumatra Province. Simultaneously, government expenditure, the open unemployment rate, and local revenue influenced the poverty rate in North Sumatra Province.

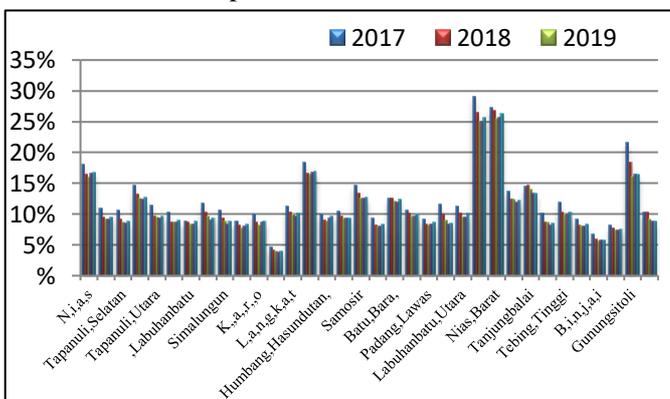
1. PENDAHULUAN

Masalah sering muncul di seluruh dunia, terutama di negara-negara non-industri. Hal ini tergantung pada tidak adanya kantor dan yayasan untuk membantu bantuan pemerintah daerah setempat. Di negara-negara berkembang di daratan Asia, Indonesia misalnya, menjadi bahan perbincangan yang sering diulas oleh semua kalangan dan setiap lapisan masyarakat.

Kemiskinan merupakan masalah yang masih sulit untuk ditangani oleh negara-negara tetangga di Indonesia, ada banyak strategi yang dilakukan oleh legislatif lingkungan di Indonesia untuk menaklukkan masalah kemiskinan yang sebenarnya belum memiliki pilihan untuk mengalahkan kemiskinan hingga saat ini. . Isu-isu dalam ruang yang disebabkan oleh kemiskinan tidak hanya dilihat dari gaji dan konsumsi provinsi yang rendah, tetapi juga tingkat pelatihan yang rendah, kesejahteraan umum wilayah yang buruk, dan kerja sama wilayah lokal yang rendah dalam proses kemajuan provinsi.

Di Indonesia ada beberapa daerah yang memiliki jumlah penduduk miskin terbesar salah satunya adalah Sumatera Utara, jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara menurut data Badan Pusat Statistik (2001) menempati urutan keempat yaitu 1,3 juta jiwa. , urutan ketiga adalah Jawa Tengah sebanyak 4,1 individu, kedua Jawa Barat dengan 4,2 juta individu dan peringkat utama adalah Jawa Timur dengan 4,6 juta individu.

Menurut Aldino (2018), jumlah penduduk sangat penting mengingat kebutuhan di suatu tempat disebabkan oleh jumlah penduduk yang tidak terkendali yang akan berdampak pada tidak tercapainya tujuan keuangan di suatu tempat. Hal ini mirip dengan kenyataan yang akan terjadi pada tahun 2021 di Provinsi Sumatera Utara, di mana penduduk terus berkembang dan kebutuhan juga meningkat. Berikut ini menunjukkan sejauh mana orang-orang miskin dikonsentrasikan lebih lanjut oleh wilayah Provinsi Sumatera Utara dengan memahami makna perluasan kemiskinan.



Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Utara (2022)

Gambar 1.1
Persentase Penduduk Miskin Menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun
2017-2020

Mengingat Badan. Tempat Statistik Provinsi Sumatera. utara (2022) tingkat negara bagian.

kebutuhan. di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2017 hingga 2020 menurun dari 10,22 persen menjadi 8,75 persen namun pada tahun 2021 meningkat menjadi 9,01 persen. Beberapa komunitas lokal atau perkotaan yang mengalami kesulitan seperti Nias, Mandailing Natal, Toba, Dairi, Nias Selatan, Nias Barat Gunungsitoli dan beberapa lainnya.

Informasi dari Badan Pusat Statistik Sumatera Utara (2022) menunjukkan bahwa pada tahun 2021 Kabupaten Nias Barat sebesar 26,42 persen, Kabupaten Deli Serdang mengalami penurunan jumlah penduduk miskin paling banyak, yaitu sebesar 4,62 persen pada tahun 2018 dan terus berkontraksi hingga tahun 2021 menjadi 4. 01%. Kota Medan tercatat sebagai salah satu kota dengan jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi yaitu sebesar 9,11 persen, dengan jumlah warga kurang mampu mencapai 204,22 ribu jiwa pada tahun 2017 dan berkurang sebesar 8,34 persen pada tahun 2021, dengan jumlah warga kurang mampu mencapai 193 jiwa. , 03 ribu roh.

Peristiwa pandemi COVID-19 pada tahun 2020 yang menimbulkan masalah keuangan, khususnya masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan selama pandemi ini adalah kewajiban umum dan otoritas publik menjadi tempat lahir selama waktu yang dihabiskan untuk mengerjakan harapan individu untuk kenyamanan sehari-hari dengan membentuk kemajuan dan prosedur yang tepat untuk melacak jawaban atas keringanan kebutuhan. Strategi pemerintah terdekat dalam melaksanakan rencana keuangan. Pendapatan dan Pengeluaran Teritorial. (APBD.), khususnya spekulasi merupakan bentuk kerja dan kemajuan DPRD dalam menyebarkan administrasi publik ke daerah. Oleh karena itu, konsumsi modal dikoordinasikan ke bidang pengembangan dengan cara yang berbeda, termasuk kemajuan dan peningkatan kesejahteraan, dan bidang transportasi, sehingga penduduk juga dapat mengambil manfaat dari pelatihan peningkatan wilayah dengan tujuan pasti untuk memenuhi harapan individu untuk kenyamanan dan kehidupan sehari-hari. bantuan pemerintah. menjadi seseorang. menjadi populasi.

Sesuai Silalahi (2020) tugas negara dalam memberdayakan peristiwa keuangan dan pembangunan keuangan, khususnya di negara-negara berkembang, dilakukan melalui pengaturan terkait uang dan moneter. Salah satu strategi keuangan otoritas publik adalah belanja pemerintah.

Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah dampak, tingkat gaji yang mempengaruhi tingkat kelimpahan yang harus dicapai. Sukirno (2010), gaji daerah mencapai puncaknya ketika kondisi kerja penuh dapat dipahami. Pengangguran akan menurunkan masyarakat dan mengurangi tingkat keberhasilan yang dicapai. Perkembangan yang lebih rendah akan menyebabkan masalah lain, khususnya kemelatan.

Menjelang awal tahun 2020, meningkatnya jumlah individu yang terjangkau Covid membuat otoritas publik membuat beberapa permintaan untuk menjaga jarak sosial untuk melakukan Pembatasan Berskala Besar (PSBB) di berbagai tempat, pelaksanaan strategi pemerintah yang berbeda untuk Ibu penyebaran atau upaya memutus mata rantai penyebaran infeksi Covid-19. 19 membuat banyak

kesepakatan latihan moneter dan bahkan menghentikan produksi. Izzati (2020) mengungkapkan, Penerapan berbagai pendekatan dalam penanganan Covid-19 membawa peningkatan efisiensi masyarakat dan organisasi, serta pemberdayaan pengembangan individu baru yang membutuhkan yang sekaligus meningkatkan jumlah individu miskin.

Kemiskinan yang terjadi di suatu tempat disebabkan oleh tidak adanya aset yang dapat dicarikan cara untuk menaikkan gaji di sekitarnya. Seperti yang ditunjukkan oleh Waluyo (2014) menurut sudut pandang moneter, kemelaratan dibedakan menjadi tiga klasifikasi, yaitu: Pertama, pada tingkat miniatur, kemelaratan muncul dari kepemilikan aset yang tidak konsisten. menyebabkan dispersi gaji yang tidak konsisten. Orang miskin telah membatasi aset normal dan kualitas rendah. Kedua, kemelaratan disebabkan oleh kontras dalam sifat SDM. Staf berkualitas buruk dengan efisiensi rendah dan upah rendah. SDM yang tidak kompeten karena landasan instruktif yang rendah, keadaan putus asa, segregasi atau kualitas turun-temurun. Ketiga, kemelaratan muncul melalui berbagai saluran untuk memperoleh modal.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pembayaran daerah mulai dari retribusi provinsi, tol provinsi, limpahan pengurus daerah, yang tidak dapat dipisahkan dari pembayaran lainnya. Tugas daerah adalah pungutan yang diawasi dan dipungut oleh pemerintah provinsi untuk membantu kabupaten yang sebenarnya. (Mosal, 2013).

Sesuai Kuncoro dalam Rahmadeni (2019) Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan untuk mensurvei kemampuan kabupaten untuk mendanai peningkatan dari aset terdekat. Kemudian lagi, lokal dengan potensi PAD tinggi umumnya hanya mendapat sedikit bantuan. Keadaan kemiskinan, pengeluaran pemerintah, tingkat kebutuhan dan pendapatan terdekat di wilayah Sumatera Utara selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1

Data Tingkat Kemiskinan (TK), Pengeluaran Pemerintah (PP), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2021

Tahun	TK	PP	TPT	PAD
2017	10,22	43.331.662.066	5.6	5.017.417.730
2018	9,22	45.313.335.247	5.56	6.505.867.607
2019	8,83	46.462.646.769	5.41	6.252.269.887
2020	8,75	45.998.594.741	6.91	6.117.744.327
2021	9,01	45.445.328.446	6,33	6.840.325.070

Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Utara (2022), diolah.

Tabel 1.1 informasi menunjukkan bahwa dari tahun 2017 - 2019 penggunaan pemerintah dari pengakuan lengkap konsumsi lokal di Sumatera Utara, khususnya berkembang dan berkurang pada tahun 2021

dan informasi tentang tingkat kebutuhan yang meningkat pada tahun 2021, sebaliknya relatif terhadap konsumsi pemerintah tahun 2020 yang mengalami penurunan dan kemelaratan tarif. Tahun 2020 juga mengalami penurunan, karena menurut Siregar (2020) belanja pemerintah merupakan salah satu tolak ukur untuk mengurangi jumlah orang yang membutuhkan dalam pemerintahan karena belanja pemerintah dari pengakuan belanja daerah dapat membantu perekonomian dan peningkatan suatu ruang, dinikmati provinsi dengan pengalangan menjadi salah satu tolak ukur untuk mengurangi jumlah individu miskin di suatu ruang.

Menurut Noviatamara (2019), pengeluaran pemerintah adalah salah satu bagian yang mengatur keuangan yang berencana untuk membangun laju usaha, membuka posisi, menjaga ketergantungan moneter dan membuat sirkulasi pembayaran yang merata.

Keanehan yang terjadi pada tingkat telah meluas dari tahun 2017 sebesar 5,60 persen menjadi 6,91 persen pada tahun 2020 dan tingkat kemiskinan telah berkurang dari tahun 2017 sebesar 10,22 persen menjadi tahun 2020 sebesar 8,75 persen, sebaliknya sesuai dengan penurunan tingkat dan tingkat kebutuhan pada tahun 2021. berkurang berkembang. Ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan tingkat kebutuhan membuat perbedaan negatif dan tidak sesuai dengan hipotesis dari penelitian sebelumnya di mana jika tingkat perkembangan meningkat, tingkat juga meningkat. Seperti yang ditunjukkan oleh Yacoub (2012) di mana jika penghuni tidak menganggur berarti memiliki pekerjaan dan gaji, dan gaji normal dari pekerjaan seharusnya untuk mengatasi masalah kehidupan, dengan asumsi persyaratan hidup terpenuhi, sehingga mereka menang. jangan miskin. Sehingga dikatakan dengan level yang rendah (extraordinary open position) maka tingkat kemelaratannya juga rendah.

Tabel 1.1 pendapatan asli Sekitar menunjukkan apa yang terjadi dari tahun 2017-2021, jika dilihat dari informasi tahun 2021, Gaji Unik Lingkungan meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu Rp. 6,1 miliar menjadi Rp. 6,8 miliar, dan angka kemiskinan pada tahun 2021 meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 8,75 persen menjadi 9,01 persen, hal ini berbanding terbalik dengan di mana jika pembayaran meningkat, kemiskinan berkurang. Menurut Rahmadeni (2019) dari hasil pemeriksaannya, Pendapatan Asli Daerah (PAD), berdampak buruk terhadap kebutuhan, dan itu berarti bahwa setiap pemekaran upah unik daerah akan mengurangi tingkat kemiskinan.

2. KAJIAN TEORITIS Kemiskinan

Menurut Romi (2018), kemiskinan adalah suatu keadaan yang sering disibukkan dengan kebutuhan, dana, dan kesulitan dalam setiap jenis keadaan kehidupan. Sesuai Fathurrahman (2012), ketidakberdayaan individu atau kegagalan keluarga untuk mengatasi masalah hidupnya.

Menurut Suliswanto (2010), kemiskinan dapat dicirikan sebagai rendahnya harapan akan kenyamanan sehari-hari, khususnya adanya kekurangan derajat suatu materi atau perkumpulan yang dikontraskan dengan cara hidup menang di masyarakat umum yang bersangkutan.

Menurut Badan Pusat Statistik (2022), kebutuhan dianggap sebagai kegagalan moneter untuk memenuhi kebutuhan makanan dan non-makanan seperti yang diperkirakan dari sisi penggunaan dan orang miskin adalah orang-orang yang memiliki penggunaan per kapita bulan ke bulan di bawah garis kemiskinan.

Belanja Pemerintah

Sesuai Sukirno dalam Sitaniapessy (2013) Penggunaan pemerintah (government use) sangat penting untuk strategi moneter, khususnya aktivitas otoritas publik untuk mengarahkan kemajuan ekonomi dengan menentukan berapa pendapatan dan konsumsi pemerintah setiap tahun, sebagaimana ditentukan dalam APBN dan APBD. arsip APBD. Motivasi di balik strategi terkait uang ini adalah untuk menemukan biaya, tingkat penciptaan, dan peluang kerja yang terbuka serta untuk memberdayakan pengembangan keuangan

Menurut Guritno dalam Baeti (2013), penggunaan pemerintah adalah seberapa besar penggunaan pemerintah digunakan untuk melayani daerah setempat. Pengeluaran Pemerintah mencerminkan pengaturan pemerintah.

Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat tarif terbatas adalah tingkat berapa banyak pertimbangan yang dibayarkan kepada angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah usia berfungsi (15 tahun ke atas) yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun sebentar tidak bekerja, dan perkembangan. Pengangguran, secara spesifik: (1) penghuni yang sedang mencari pekerjaan secara efektif, (2) penghuni yang merencanakan organisasi/pekerjaan baru, (3) penghuni yang tidak mencari pekerjaan karena merasa sulit mencari pekerjaan baru. bidang pekerjaan, (4) perkumpulan yang tidak efektif mencari pekerjaan dengan alasan sudah ada pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (Badan Pusat Statistik, 2020).

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan uang yang masuk ke daerah yang tepat yang dirasakan sebagai tambahan dari total aset dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu repot untuk diganti oleh badan publik, Idris (2016), Pendapatan Asli Daerah (PAD) (PAD) adalah semua wilayah pembayaran uang yang dianggap memiliki Nilai Aktiva Bersih yang berlebihan dalam satu tahun moneter dan tidak akan digantikan oleh otoritas publik. Tuntutan yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah setempat seharusnya tidak menghasilkan biaya produksi yang lebih tinggi daripada pendapatan pajak yang diperoleh oleh legislatif lingkungan, Idris (2016).

METODE PENELITIAN

Objek dan Lokasi Penelitian

Dalam tinjauan ini, item yang digunakan untuk mengarahkan penelitian adalah pengeluaran pemerintah daerah, tingkat pengangguran dan pendapatan asli daerah sebagai variabel otonom (bebas) dan kemiskinan sebagai

variabel bebas dengan wilayah eksplorasi yang diselesaikan di Provinsi Sumatera Utara.

Jenis dan Sumber Informasi

Jenis informasi yang digunakan untuk pemeriksaan ini adalah informasi opsional, yaitu informasi yang sudah dikerjakan dan layak untuk ditangani. Informasi yang digunakan dalam eksplorasi ini bersifat publik dari Badan Pusat Statistik Sumatera Utara dari tahun 2017 hingga 2021.

Metode pengumpulan Data

Untuk mencapai target tinjauan ini, data diambil sepenuhnya melalui informasi opsional. Informasi opsional yang didapat dalam tinjauan ini diambil dari situs distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, khususnya <https://sumut.bps.go.id/distribution>, mengumpulkan informasi konsumsi provinsi per wilayah sebagai tantangan administrasi dalam satuan rupiah, mengumpulkan informasi tingkat terbuka per daerah dalam persen dan mengumpulkan informasi pendapatan lingkungan per daerah dalam rupiah dari tahun 2017 sampai 2021 sebagai administrasi faktor informasi bebas, sedangkan untuk informasi pengelolaan tingkat masyarakat miskin per daerah dari tahun 2017 sampai 2021 diambil sebagai tingkat kebutuhan. Setelah informasi dikumpulkan dan digabungkan untuk penanganan menggunakan aplikasi EVIEWS 9.

Pengertian Variabel Operasional

Arti dari faktor fungsional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengeluaran Pemerintah (X1)
Konsumsi pemerintah dalam penelitian ini adalah penggunaan lokal absolut pada setiap satu dari 33 aturan/wilayah perkotaan di Provinsi Sumatera Utara tahun 2017 - 2021, diperkirakan dalam rupiah (Rp)
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (X2)
Tingkat terbuka adalah tingkat informasi tingkat terbuka di setiap satu dari 33 aturan/komunitas perkotaan tahun 2017 - 2021 di Provinsi Sumatera Utara. Diperkirakan menggunakan persen (%)
3. Pendapatan Asli Daerah (X3)
Pendapatan unik provinsi dalam penelitian ini adalah pungutan daerah habis-habisan, tol teritorial, limpahan lokal terpencil hasil dewan dan PAD otentik lainnya di setiap 33 peraturan/kelurahan dari tahun 2017 sampai 2021 di Provinsi Sumatera Utara dan diperkirakan menggunakan satuan rupiah (Rp. .) .
4. Tingkat Kemiskinan (Y)
Angka Kemiskinan adalah besarnya jumlah penduduk miskin di setiap 33 kelurahan/kelurahan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 di Provinsi Sumatera Utara dan diperkirakan menggunakan persen (%).

Metode Analisis data Analisis Data Panel

Dalam tinjauan ini, informasi dewan digunakan untuk melihat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Informasi papan merupakan perpaduan antara data cross section dan informasi deret waktu, di mana unit lintas segmen

yang serupa diperkirakan pada berbagai waktu. Investigasi regresi data dewan adalah pemeriksaan kekambuhan dalam pandangan dewan informasi untuk melihat hubungan antara variabel terikat dan setidaknya satu faktor bebas (Jaya dan Sunengsih, 2009).

Dengan persamaan regresi data panel yaitu sebagai berikut :

Model dalam penelitian ini adalah :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e$$

Keterangan :

Y = Tingkat Kemiskinan

X1 = Pengeluaran Pemerintah

X2 = Tingkat Pengangguran Terbuka

X3 = Pendapatan Asli Daerah

β = Koefisien Regresi

α = Konstanta

e = Error Term

i = Banyaknya observasi

t = Banyaknya waktu

Model Regresi Data Panel:

a) *Common Effect Model*

Seperti yang ditunjukkan oleh Widarjono (2017) model dampak normal menggabungkan informasi lintas area dengan deret waktu dan memanfaatkan strategi OLS untuk menilai model informasi papan. Model ini tidak bisa mengenali variasi antara titik dan fokus waktu karena memiliki tangkapan yang bagus dan tidak berubah sembarangan.

b) *Model fixed*

Menurut Santoso (2015) pengertian model dampak layak adalah model dengan pengambilan alternatif untuk setiap subjek (segmen silang), namun kemiringan setiap subjek tidak berubah dalam jangka panjang. Model ini mengharapkan hasil tangkapan yang berbeda untuk setiap subjek sementara kemiringan berlanjut seperti sebelumnya antar subjek. Dalam membedakan satu subjek dari yang lain, variabel palsu digunakan. Model ini sering disebut sebagai model Least Square Dummy Variables (LSDV).

c) *Model Random*

Seperti yang ditunjukkan oleh Gujarati, (2012) model dampak tidak beraturan digunakan untuk mengatasi kekurangan model dampak yang tepat yang menggunakan faktor fiker. Teknik investigasi informasi papan dengan model dampak sewenang-wenang harus memenuhi kebutuhan, untuk lebih spesifik jumlah segmen lintas harus lebih diperhatikan daripada jumlah faktor eksplorasi.

Pemilihan Model Data Panel

a) *Uji Chow*

Uji Chow digunakan untuk memilih model yang unggul antara model tumbukan normal dan model tumbukan layak. Spekulasinya adalah
H0 : Dampak umum model lebih baik

Ha : Model dampak yang tepat lebih baik

Jika H0 ditolak, harga-P tidak sepenuhnya bernilai . Kemudian lagi, H0 diakui apakah nilai P lebih penting daripada nilai . Nilai kritis yang digunakan adalah 5%. Ketika model yang dipilih adalah model dampak yang layak, satu pengujian lagi dilakukan, khususnya uji Hausman untuk melihat apakah lebih baik menggunakan model dampak yang tepat (FEM) atau model dampak tidak teratur (REM). (Widarjono, 2017).

b. uji Hausman

Pengujian ini membandingkan model dampak yang tepat dan dampak tidak teratur dalam menentukan model terbaik untuk digunakan sebagai model kekambuhan papan informasi, Santoso (2015).

1. Dengan asumsi nilai kepentingan < 0,05, model terbaik adalah kekambuhan papan informasi dengan FEM.

2. Dengan asumsi nilai kepentingan > 0,05, model terbaik adalah kekambuhan papan informasi dengan REM.

c) *Uji Lagrange Multiplier*

(LM-test) adalah pengujian untuk memutuskan apakah model Random Effect atau Common Effect (OLS) yang paling tepat untuk digunakan. Uji LM bergantung pada dispersi chi-kuadrat dengan derajat redom faktor bebas. Dengan asumsi nilai LM terukur lebih penting daripada nilai dasar pengukuran chi-kuadrat, maka, pada saat itu, kami menolak Ho, dan itu menyiratkan bahwa ukuran yang tepat untuk model kekambuhan papan informasi adalah teknik Efek Acak dari Common Strategi efek. Kemudian lagi, dengan asumsi bahwa harga LM faktual tidak persis nilai terukur chi-kuadrat sebagai nilai dasar, maka Ho diakui, dan itu berarti bahwa penilaian yang digunakan dalam kekambuhan informasi papan adalah strategi Common Effect, bukan teknik Random Effect. (Widarjono, 2017).

Uji asumsi kalsik

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah apa yang terjadi dimana terdapat hubungan faktor bebas antara satu dengan yang lainnya. Uji multikolinearitas berencana untuk menguji apakah model relaps melacak hubungan antara faktor bebas (otonom). Tanda model relaps yang layak adalah adanya kekurangan hubungan antara faktor bebas seperti yang ditunjukkan oleh Ghozali (2017) Jika faktor bebas dihubungkan satu sama lain, maka pada saat itu faktor-faktor tersebut tidak simetris. Faktor simetris adalah faktor otonom yang harga hubungan antara faktor bebas sama dengan tidak ada. Uji multikolinearitas harus terlihat melalui hubungan harga diri. Tidak ada multikolinearitas dengan asumsi koneksi r esteem di bawah 0,8. Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah residual dari model berbingkai mengalami perubahan yang konsisten atau tidak. Model yang layak adalah model yang memiliki perubahan yang stabil dari setiap pengaruh yang meresahkan atau berlama-lama. Heteroskedastisitas adalah suatu keadaan dimana anggapan yang tidak terpenuhi, seperti dimana anggapan

salah dan merupakan selisih blunder yang berbeda setiap rentang waktu (Iqbal, 2015).

Pengujian Hipotesis

Uji Parsial (Uji t)

Pengujian ini dilakukan berdasarkan korelasi nilai t setiap koefisien relaps dengan nilai t tabel (nilai dasar) dengan derajat besar 5% dengan tingkat peluang $df = (n - k)$, di mana n adalah besaran persepsi dan k adalah jumlah faktor yang diinginkan, jika $t_{hitung} < t_{tabel} (n-k)$, faktor agak bebas (tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Jika $t_{hitung} > t_{tabel} (n-k)$, faktor bebas sedikit mempengaruhi variabel terikat .

Uji Konkuren (Uji f)

Uji F dipimpin untuk dampak bersamaan dari faktor otonom pada faktor tertentu. Dalam hal uji F yang ditentukan $>$ nilai F tabel, variabel otonom secara keseluruhan mempengaruhi variabel terikat (Gujarati et al., 2012)

Dalam hal F hitung $>$ F tabel, H_0 dihilangkan dan H_a diakui yang berarti variabel otonom (X) pada saat yang sama atau pada saat yang sama pada dasarnya mempengaruhi variabel (Y)

Jika F hitung $<$ F tabel, maka H_0 diakui dan H_a ditolak, dan itu berarti bahwa variabel otonom (X) secara keseluruhan atau pada saat yang sama berpengaruh signifikan terhadap variabel (Y).

Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Iqbal (2015) Koefisien Determinasi (Goodness of Fit) ditandai dengan R-square yang merupakan ukuran signifikan dalam kekambuhan, karena dapat melaporkan terlepas dari apakah model kekambuhan yang dinilai besar. Nilai koefisien jaminan mencerminkan seberapa banyak variasi dalam variabel tidak sepenuhnya diselesaikan oleh faktor bebas. Dengan asumsi Koefisien Determinasi setara dengan 0, ini menyiratkan bahwa variasi variabel tidak ditentukan oleh faktor bebas oleh imajinasi apa pun. Untuk sementara, dengan asumsi Koefisien Determinasi setara dengan 1, ini menyiratkan bahwa variasi variabel umum dapat dipahami oleh variabel otonom. Dengan cara ini, apakah kondisi kekambuhan positif atau tidak sepenuhnya ditentukan oleh R-kuadratnya, yang memiliki nilai antara tidak ada.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penentuan Teknik Estimasi Data Panel

Hasil Uji Chow

Uji *chow* dilakukan untuk menguji model manakah yang terpilih diantara *common effect* dengan *fixed effect*. berikut ini adalah hasil UjiChow:

Tabel 4.1
Hasil Istimasi Uji Chow

Sumber : Eviews 9 data diolah, 2022

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	115.577301	(32,128)	0.0000
Cross-section Chi-square	557.217662	32	0.0000

Berdasarkan tabel 4.1 hasil yang diperoleh dari Redundant Fixed Effect Test diperoleh nilai probabilitas Chi-Square $< \alpha$ 5% yaitu $0,0000 < 0,05$. Ini mendandakan fixed effect model lebih baik digunakan dari pada common effect model berdasarkan dilihat dari hasil pengujian ini.

Hasil Uji Hausmant

Uji *Hausmant* adalah pengujian yang digunakan untuk memilih model mana yang lebih baik digunakan antara Fixed effect model (FEM) atau Random effect model (REM). Berikut ini adalah hasil dari Uji *Hausmant*:

Tabel 4.2
Hasil Estimasi UjiHausmant

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.860891	3	0.6018

Sumber : Eviews 9 data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.2 efek sampling dari Uji Hausmant, kemungkinan harga lebih menonjol dari 5%, tepatnya $0,6018 > 0,05$. Ini menyiratkan bahwa model dampak arbitrer lebih pintar digunakan daripada model dampak yang tepat, dari konsekuensi uji Hausman cenderung disimpulkan bahwa model dampak tidak beraturan adalah model yang dipilih sehingga penting untuk melanjutkan uji pengali Lagrange .

Hasil Uji Lagrange multiplier

Uji Lagrange multiplier diarahkan untuk mengetahui model mana yang dipilih antara model tumbukan normal dan model tumbukan arbitrer. Dengan susunan kemungkinan Breusch-Pagan ($> 0,05$), model yang dipilih adalah model dampak normal, sedangkan jika kemungkinan Breusch-Pagan ($< 0,05$) adalah model yang dipilih, itu adalah model dampak tidak beraturan. Konsekuensi dari Uji Pengganda Lagrange dalam ulasan ini adalah:

Tabel 4.3

Hasil Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
			296.688
Breusch-Pagan	295.9698	0.719125	9
	(0.0000)	(0.3964)	(0.0000)

Sumber : Eviews 9 data diolah, 2022

Dilihat dari tabel 4.3, konsekuensi dari uji pengali Lagrange, nilai kemungkinan bagian Breusch-Pagan dari dua segmen lebih penting dari 5%, yaitu $0,000 > 0,05$. Ini menyiratkan bahwa model dampak tidak beraturan lebih disukai digunakan daripada model dampak normal, sehingga konsekuensi dari model dampak arbitrer digunakan dalam tinjauan ini.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas diarahkan untuk memutuskan apakah ada hubungan besar antara faktor bebas dan faktor otonom lainnya. Jika nilai koefisien hubungan pecahan variabel lebih besar dari 0,80 maka terjadi efek samping multikolinearitas, begitu juga sebaliknya. Berikutnya adalah konsekuensi dari pengujian multikolinearitas dalam ulasan ini.

Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolinearitas

	LOG K1	X 2	LOGX
LOG K1	1.0000000	0.2524653	0.78273867
X2	0.25246531	1.0000000	0.5166162
LOG K3	0.78273867	0.5166162	1.00000000

Sumber : Eviews 9 data diolah, 2022

Konsekuensi dari tabel 4.4 di atas adalah faktor antara faktor bebas khususnya variabel penggunaan otoritas publik (LOGX1), variabel tingkat terbuka (X2), variabel pembayaran unik teritorial (LOGX3) tidak ada hubungan antara faktor otonom pada dengan alasan bahwa setiap variabel memiliki nilai atau di bawah 0,80. Hal ini menyiratkan bahwa pemeriksaan ini terbebas dari multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah suatu kondisi dimana selisih tiap soal tidak tetap. Pengujian heteroskedastisitas menggunakan strategi RESABS pada alat investigasi Eviews-9, dengan pengaturan likelihood esteem, dengan asumsi nilai kemungkinan setiap

variabel lebih menonjol ($>0,05$) dengan derajat alpha 5% maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 4.5
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: RESABS				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	13.07625	14.43680	0.905759	0.3664
LOGX1	0.567647	0.751973	-0.754877	0.4514
X2	0.096277	0.079090	-1.217299	0.2253
LOGX3	0.139489	0.227508	0.613115	0.5407

Sumber : Eviews 9 data diolah, 2022

Berdasarkan hasil pada tabel 4.6 di atas, sangat terlihat bahwa kemungkinan setiap variabel dari pengeluaran pemerintah,, pengangguran terbuka, dan pendapatan asli di atas ($> 0,05$). Sehingga dapat dikatakan bahwa kunci dalam penelitian ini adalah terbebas dari heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Data Panel

Model Efek Random

Mengingat konsekuensi dari Tabel 2 Hausman Testpad, model yang paling tepat untuk memahami efek samping dari tinjauan ini adalah Random Effect Model(REM).

Tabel 4.6
Hasil Estimasi Random effect

Dependent Variable: Y				
Cross-sections included: 33				
Total panel (unbalanced) observations: 164				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	77.89493	16.66920	4.672986	0.0000
LOGX1	-2.861612	0.859211	3.330512	0.0011
X2	-0.094868	0.087389	1.085591	0.2793
LOGX3	-0.344457	0.246560	1.397053	0.1643
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			4.386160	0.9618
Idiosyncratic random			0.874643	0.0382
Weighted Statistics				
R-squared	0.133107	Mean dependent var	1.0105	15
Adjusted R-squared	0.116853	S.D. dependent var	0.9264	23

S.E. of regression	0.871038	Sum squared resid	121.3932
F-statistic	8.189052	Durbin-Watson stat	1.096425
Prob(F-statistic)	0.000042		

Sumber : Eviews 9 data diolah, 2022

Berdasarkan pada tabel 4.4 Di atas maka dapat diperoleh persamaan hasil regresi adalah sebagai berikut:

$$Y = 77.89493 - 2.861612\text{LOGX1} - 0.094868\text{X2} - 0.344457\text{LOGX3}$$

Keterangan :

- Y = Tingkat Kemiskinan
 LogX1 = Pengeluaran Pemerintah
 X2 = Tingkat Pengangguran Terbuka
 LogX3 = Pendapatan Asli Daerah

Nilai konsisten dari hasil regresi adalah 77,89493 yang sebenarnya bermaksud bahwa dengan asumsi variabel pengeluaran pemerintah, tingkat pendapatan asli adalah stabil = (0) atau tetap, tingkat kebutuhan akan konsisten pada 77,89%. Nilai koefisien variabel konsumsi adalah - 2.861612, dan itu menyiratkan bahwa sementara pengeluaran pemerintah meningkat sebesar 1 Rupiah, itu sebenarnya ingin mengurangi tingkat kebutuhan sebesar 2,86% dengan anggapan bahwa tingkat suku bunga dan faktor pendapatan daerah dipandang konsisten . Kemudian nilai koefisien variabel sebesar 0,09 persen dengan dugaan bahwa faktor-faktor tersebut dan pendapatan yang berdekatan dipandang konsisten. Selain itu, koefisien pembayaran unik teritorial adalah - 0,344457, dan itu benar-benar dimaksudkan bahwa dengan asumsi ada peningkatan berapa banyak gaji unik terdekat sebesar 1 rupiah, itu akan membuat variabel berkurang 0,34 persen dengan dugaan faktor-faktor dan derajat penurunan dipandang sebagai stabil.

Hasil Koefisien Masing-Masing Kabupaten/Kota

Hasil intercept masing-masing provinsi berdasarkan model *random effect* yang terpilih yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.7
Hasil Koefisien Masing-Masing
Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Koefisien	Intercept
N i a s	4.253886	82.14882
Mandailing Natal	-0.61666	77.27827
Tapanuli Selatan	-1.69843	76.1965
Tapanuli Tengah	2.059255	79.95419
Tapanuli Utara	-1.19104	76.70389
Toba Samosir	-2.93496	74.95997
Labuhanbatu	-1.94006	75.95487

A s a h a n	-0.08064	77.81429
Simalungun	0.284947	78.17988
D a i r i	-3.48109	74.41384
K a r o	-1.9702	75.92473
Deli Serdang	-2.03927	75.85566
L a n g k a t	0.697215	78.59215
Nias Selatan	5.490747	83.38568
Humbang Hasundutan	-2.93918	74.95575
Pakpak Bharat	-4.54081	73.35412
Samosir	0.541256	78.43619
Serdang Bedagai	-2.07535	75.81958
Batu Bara	1.013766	78.9087
Padang Lawas Utara	-1.61535	76.27958
Padang Lawas	-3.15078	74.74415
Labuhanbatu Selatan	-2.58613	75.3088
Labuhanbatu Utara	-1.74747	76.14746
Nias Utara	13.48806	91.38299
Nias Barat	12.6754	90.57033
S i b o l g a	-0.2067	77.68823
Tanjungbalai	1.19969	79.09462
Pematangsiantar	-2.2935	75.60143
Tebing Tinggi	-1.8392	76.05573
M e d a n	2.64941	80.54434
B i n j a i	-5.6936	72.20133
Padangsidempuan	-4.5211	73.37383
Gunungsitoli	4.807924	82.70285

Sumber : Eviews 9 data diolah, 2022

Estimasi model random effect, maka nilai koefisien konstanta masing- masing kabupaten/kota dapat dijelaskan antara lain :

1. Kabupaten Nias

Memiliki nilai intersep sebesar 82.14882 artinya apabila pengeluaran pemerintah, tingkat pengangguran terbuka dan pendapatan asli daerah di Nias memiliki nilai tetap, maka tingkat kemiskinan di kabupaten Nias akan tetap sebesar 82.15 persen.

2. Kabupaten Mandailing Natal

Memiliki nilai intersep sebesar 77.27827, artinya apabila pengeluaran pemerintah, tingkat pengangguran terbuka dan pendapatan asli daerah di Mandailing Natal memiliki nilai tetap, maka tingkat kemiskinan di kabupaten Mandailing Natal akan tetap sebesar 77.28 persen.

3. Kabupaten Tapanuli Selatan

Memiliki nilai intersep sebesar 76.1965, artinya apabila pengeluaran pemerintah, tingkat pengangguran terbuka dan pendapatan asli daerah di Tapanuli Selatan memiliki nilai tetap, maka tingkat kemiskinan di kabupaten Tapanuli Selatan akan tetap sebesar 76.20 persen.

4. Kabupaten Tapanuli Tengah

Memiliki nilai intersep sebesar 79.95419 artinya apabila pengeluaran pemerintah, tingkat pengangguran

terbuka dan pendapatan asli daerah di Tapanuli Tengah memiliki nilai tetap, maka tingkat kemiskinan di kabupaten Tapanuli Tengah akan tetap sebesar 79.95 persen.

5. Kabupaten Tapanuli Utara

Memiliki nilai intersep sebesar 76.70389 artinya apabila pengeluaran pemerintah, tingkat pengangguran terbuka dan pendapatan asli daerah di Tapanuli Utara memiliki nilai tetap, maka tingkat kemiskinan di kabupaten Tapanuli Utara akan tetap sebesar 76.70 persen.

6. Kabupaten Toba Samosir

Memiliki nilai intersep sebesar 74.95997 artinya apabila pengeluaran pemerintah, tingkat pengangguran terbuka dan pendapatan asli daerah di Toba Samosir memiliki nilai tetap, maka tingkat kemiskinan di kabupaten Toba Samosir akan tetap sebesar 74.96 persen.

7. Kabupaten Labuhanbatu

Memiliki nilai intersep sebesar 75.95487 artinya apabila pengeluaran pemerintah, tingkat pengangguran terbuka dan pendapatan asli daerah di Labuhanbatu memiliki nilai tetap, maka tingkat kemiskinan di kabupaten Labuhanbatu akan tetap sebesar 75.95 persen.

8. Kabupaten Asahan

Memiliki nilai intersep sebesar 77.81429 artinya apabila pengeluaran pemerintah, tingkat pengangguran terbuka dan pendapatan asli daerah di Asahan memiliki nilai tetap, maka tingkat kemiskinan di kabupaten Asahan akan tetap sebesar 77.81 persen.

9. Kabupaten Simalungun

Memiliki nilai intersep sebesar 78.17988 artinya apabila pengeluaran pemerintah, tingkat pengangguran terbuka dan pendapatan asli daerah di Simalungun memiliki nilai tetap, maka tingkat kemiskinan di kabupaten Simalungun akan tetap sebesar 78.18 persen.

10. Kabupaten Dairi

Memiliki nilai intersep sebesar 74.41384 artinya apabila pengeluaran pemerintah, tingkat pengangguran terbuka dan pendapatan asli daerah di Dairi memiliki nilai tetap, maka tingkat kemiskinan di kabupaten Dairi akan tetap sebesar 74.41 persen.

11. Kabupaten Karo

Memiliki nilai intersep sebesar 75.92473 artinya apabila pengeluaran pemerintah, tingkat pengangguran terbuka dan pendapatan asli daerah di Karo memiliki nilai tetap, maka tingkat kemiskinan di kabupaten Karo akan tetap sebesar 75.92 persen.

12. Kabupaten Deli Serdang

Memiliki nilai intersep sebesar 75.85566 artinya apabila pengeluaran pemerintah, tingkat pengangguran terbuka dan pendapatan asli daerah di Deli Serdang memiliki nilai tetap, maka tingkat kemiskinan di kabupaten Deli Serdang akan tetap sebesar 75.86 persen.

13. Kabupaten Langkat

Memiliki nilai intersep sebesar 78.59215 artinya apabila pengeluaran pemerintah, tingkat pengangguran terbuka dan pendapatan asli daerah di Langkat memiliki nilai tetap, maka tingkat kemiskinan di kabupaten Langkat akan tetap sebesar 78.59 persen.

14. Kabupaten Nias Selatan

Memiliki nilai intersep sebesar 83.38568 artinya apabila pengeluaran pemerintah, tingkat pengangguran terbuka dan pendapatan asli daerah di Nias Selatan memiliki nilai tetap, maka tingkat kemiskinan di kabupaten Nias Selatan akan tetap sebesar 83.39 persen.

15. Kabupaten Humbang Hasundutan

Memiliki nilai intersep sebesar 74.95575 artinya apabila pengeluaran pemerintah, tingkat pengangguran terbuka dan pendapatan asli daerah di Humbang Hasundutan memiliki nilai tetap, maka tingkat kemiskinan di kabupaten Humbang Hasundutan akan tetap sebesar 74.96 persen.

16. Kabupaten Pakpak Bharat

Memiliki nilai intersep sebesar 73.35412 artinya apabila pengeluaran pemerintah, tingkat pengangguran terbuka dan pendapatan asli daerah di Pakpak Bharat memiliki nilai tetap, maka tingkat kemiskinan di kabupaten Pakpak Bharat akan tetap sebesar 73.35 persen.

17. Kabupaten Samosir

Memiliki nilai intersep sebesar 78.43619 artinya apabila pengeluaran pemerintah, tingkat pengangguran terbuka dan pendapatan asli daerah di Samosir memiliki nilai tetap, maka tingkat kemiskinan di kabupaten Samosir akan tetap sebesar 78.44 persen.

18. Kabupaten Serdang Bedagai

Memiliki nilai intersep sebesar 75.81958 artinya apabila pengeluaran pemerintah, tingkat pengangguran terbuka dan pendapatan asli daerah di Serdang Bedagai memiliki nilai tetap, maka tingkat kemiskinan di kabupaten Serdang Bedagai akan tetap sebesar 75.82 persen.

19. Kabupaten Batu Bara

Memiliki nilai intersep sebesar 78.9087 artinya apabila pengeluaran pemerintah, tingkat pengangguran terbuka dan pendapatan asli daerah di Batu Bara memiliki nilai tetap, maka tingkat kemiskinan di kabupaten Batu Bara akan tetap sebesar 78.91 persen.

20. Kabupaten Padang Lawas Utara

Memiliki nilai intersep sebesar 76.27958 artinya apabila pengeluaran pemerintah, tingkat pengangguran terbuka dan pendapatan asli daerah di Padang Lawas Utara memiliki nilai tetap, maka tingkat kemiskinan di kabupaten Padang Lawas Utara akan tetap sebesar 76.28 persen.

21. Kabupaten Padang Lawas

Memiliki nilai intersep sebesar 74.74415 artinya apabila pengeluaran pemerintah, tingkat pengangguran terbuka dan pendapatan asli daerah di Padang Lawas memiliki nilai tetap, maka tingkat kemiskinan di kabupaten Padang Lawas akan tetap sebesar 74.74 persen.

22. Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Memiliki nilai intersep sebesar 75.3088 artinya apabila pengeluaran pemerintah, tingkat pengangguran terbuka dan pendapatan asli daerah di Labuhanbatu Selatan memiliki nilai tetap, maka tingkat kemiskinan di kabupaten Labuhanbatu Selatan akan tetap sebesar 75.30 persen.

23. Kabupaten Labuhanbatu Utara

Memiliki nilai intersep sebesar 76.14746 artinya apabila pengeluaran pemerintah, tingkat pengangguran terbuka dan pendapatan asli daerah di Labuhanbatu Utara memiliki nilai tetap, maka tingkat kemiskinan di kabupaten

Labuhanbatu Utara akan tetap sebesar 76.15 persen.

24. Kabupaten Nias Utara

Memiliki nilai intersep sebesar 91.38299 artinya apabila pengeluaran pemerintah, tingkat pengangguran terbuka dan pendapatan asli daerah di Nias Utara memiliki nilai tetap, maka tingkat kemiskinan di kabupaten Nias Utara akan tetap sebesar 91.38 persen.

25. Kabupaten Nias Barat

Memiliki nilai intersep sebesar 90.57033 artinya apabila pengeluaran pemerintah, tingkat pengangguran terbuka dan pendapatan asli daerah di Nias Barat memiliki nilai tetap, maka tingkat kemiskinan di kabupaten Nias Barat akan tetap sebesar 90.57 persen.

26. Kota Sibolga

Memiliki nilai intersep sebesar 77.68823 artinya apabila pengeluaran pemerintah, tingkat pengangguran terbuka dan pendapatan asli daerah di Sibolga memiliki nilai tetap, maka tingkat kemiskinan di Kota Sibolga akan tetap sebesar 77.69 persen.

27. Kota Tanjungbalai

Memiliki nilai intersep sebesar 79.09462 artinya apabila pengeluaran pemerintah, tingkat pengangguran terbuka dan pendapatan asli daerah di Tanjungbalai memiliki nilai tetap, maka tingkat kemiskinan di Kota Tanjungbalai akan tetap sebesar 79.09 persen.

28. Kota Pematangsiantar

Memiliki nilai intersep sebesar 75.60143 artinya apabila pengeluaran pemerintah, tingkat pengangguran terbuka dan pendapatan asli daerah di Pematangsiantar memiliki nilai tetap, maka tingkat kemiskinan di Kota Pematangsiantar akan tetap sebesar 75.60 persen.

29. Kota Tebing Tinggi

Memiliki nilai intersep sebesar 76.05573 artinya apabila pengeluaran pemerintah, tingkat pengangguran terbuka dan pendapatan asli daerah di Tebing Tinggi memiliki nilai tetap, maka tingkat kemiskinan di Kota Tebing Tinggi akan tetap sebesar 76.06 persen.

30. Kota Medan

Memiliki nilai intersep sebesar 80.54434 artinya apabila pengeluaran pemerintah, tingkat pengangguran terbuka dan pendapatan asli daerah di Medan memiliki nilai tetap, maka tingkat kemiskinan di Kota Medan akan tetap sebesar 80.54 persen.

31. Kota Binjai

Memiliki nilai intersep sebesar 72.20133 artinya apabila pengeluaran pemerintah, tingkat pengangguran terbuka dan pendapatan asli daerah di Binjai memiliki nilai tetap, maka tingkat kemiskinan di Kota Binjai akan tetap sebesar 72.20 persen.

32. Kota Padangsidimpuan

Memiliki nilai intersep sebesar 73.37383 artinya apabila pengeluaran pemerintah, tingkat pengangguran terbuka dan pendapatan asli daerah di Padangsidimpuan memiliki nilai tetap, maka tingkat kemiskinan di Kota Padangsidimpuan akan tetap sebesar 73.37 persen.

33. Kota Gunungsitoli

Memiliki nilai intersep sebesar 82.70285 artinya apabila pengeluaran pemerintah, tingkat pengangguran terbuka dan pendapatan asli daerah di Gunungsitoli memiliki nilai tetap, maka tingkat kemiskinan di Kota

Gunungsitoli akan tetap sebesar 82.70 persen.

Pengujian Hipotesis

Uji Parsial (Uji t)

Uji secara parsial (uji-t) untuk melihat berapa besar pengaruh setiap variabel bebas terhadap variabel terikat pengujian ini. Berikut adalah hasil pengujian secara parsial:

Tabel 4.8
Hasil Pengujian Secara Parsial (Uji t)

Variabel Bebas	t Statistik	t Tabel	Alpha	Prob	Keterangan
LOGX1	-3.330512	1.97490	0,05	0.0011	Signifikan
X2	1.085591			0.2793	Tidak signifikan
LOGX3	1.397053			0.1643	Tidak signifikan

Sumber : Eviews 9 data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.8 diperoleh nilai t-hitung konsumsi pemerintah (LogX1) adalah - 3,330512, lebih penting dari t-tabel, yaitu 1,97490. Hal ini berimplikasi bahwa Belanja Pemerintah (LogX1) mempengaruhi kebutuhan di daerah Sumatera Utara. Atau sebaliknya cenderung dilihat dari kemungkinan esteem yang lebih kecil dari alpha 0,05 Untuk faktor x2 dan LogX3 nilai kemungkinannya tinggi sehingga tidak tepat untuk menggunakan alpha 1%, 5% dan 10%. Nilai kemungkinan dari tingkat pengangguran terbuka (X2) adalah 0,2793 yang lebih penting daripada alpha 5%. Hal ini berimplikasi bahwa tingkat pengangguran terbuka mempengaruhi tingkat kebutuhan di daerah Sumatera Utara. Nilai kemungkinan pendapatan lingkungan (LogX3) adalah 0,1643 yang lebih menonjol dari 5% alpha. Hal ini berimplikasi bahwa pendapatan yang dekat mempengaruhi tingkat kemelaratan di daerah Sumatera Utara.

Uji Parsial Dengan Uji f

adalah uji yang digunakan untuk memutuskan apakah faktor otonom pada saat yang sama mempengaruhi faktor bebas. Berikut hasil pengujianya

Tabel 4.9
Hasil Pengujian Secara Simultan (uji F)

F Statistik	F Tabel	Prob	Keterangan
8.189052	2.66	0.000042	Signifikan

Sumber : Eviews 9 data diolah, 2022

Dilihat dari tabel 4.9 diatas, secara umum terlihat bahwa nilai Fstatistik > Ftabel (8,189052 > 2,66) dengan probabilitas (0,000042 < 0,05) maka dapat dikatakan bahwa secara bersama-sama faktor Pengeluaran Pemerintah, Tingkat Pengangguran Terbuka dan sekitarnya faktor upah memiliki efek. Apalagi mengutuk persyaratan

kesetaraan dan nilai di Provinsi Sumatera Utara.

Koefisien Determinasi (R^2)

Penyesuaian nilai R-Squared dalam penelitian ini adalah 0,116853. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara komponen independen dan variabel dependen dalam penelitian ini adalah 11,68% dan $1 - 0,116853 = 0,883147$, dan disimpulkan bahwa 88,31% lainnya dipengaruhi oleh berbagai elemen di luar penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial variabel pengeluaran pemerintah yang digunakan dalam penelitian ini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini sesuai dengan spekulasi yang mendasarinya yang menyatakan bahwa pada saat-saat tertentu dianggap berdampak pada kemiskinan di wilayah Sumatera Utara.

Pada prinsipnya pengeluaran pemerintah merupakan salah satu tolak ukur untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam pemerintahan karena pengeluaran pemerintah berasal dari pengakuan penggunaan wilayah yang dapat membantu perekonomian dan kemajuan suatu ruang, provinsi menikmati dengan pengalangan selesai untuk mengurangi kuantitas individu yang membutuhkan di suatu tempat. Akibat penelitian seperti yang telah dilakukan oleh penelitian dari Ketaren (2018) yang menyatakan bahwa variabel penggunaan mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Dan itu menyiratkan bahwa ekspansi besar-besaran dalam pengeluaran pemerintah akan mengurangi kemiskinan. Sesuai dengan apa yang telah diselesaikan oleh eksplorasi Putri (2021) yang menyatakan bahwa variabel konsumsi berpengaruh negatif namun tidak terlalu besar terhadap kebutuhan di Indonesia. Ketidakrelevanan pengeluaran pemerintah untuk kemelaratan yang disebabkan oleh tantangan pemerintah untuk asuransi sosial, misalnya, program bantuan tunai, proyek perwalian keluarga, alokasi dan tugas lain yang tidak seluruhnya ditentukan.

Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan estimasi analisis data panel, diketahui bahwa X_2 yaitu tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Dari konsekuensi koefisien tingkat kekhawatiran terhadap dampak pesimistis dan tidak relevan terhadap kebutuhan, hal ini diperkirakan akan menyebabkan banyaknya pandemi virus corona yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) para dokter spesialis dan mengakibatkan perluasan pembangunan yang belum tentu membawa dampak negatif. tentang seseorang menjadi miskin karena selama pandemi virus Corona orang harus mengenal inovasi yang pada saat itu Akhirnya, orang-orang tertentu menemukan jenis

pendapatan baru, seperti pemasaran terkomputerisasi dan pembuat konten yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. kebutuhan pokok sehari-hari.

Akibat konsentrat ini sebagaimana dikemukakan oleh Suropto (2020), khususnya pembangunan sangat berdampak pada kemiskinan di D.I.Yogyakarta, mengingat perkembangan tersebut terdiri dari empat golongan yang menganggur namun belum siap untuk mengatasi permasalahan mereka, karena tidak semua pengangguran umumnya miskin, karena kelompok pengangguran terbuka tertentu membutuhkan. di area santai, dan di bagian lain dari area itu sendiri ada juga pekerjaan dengan jam kerja kurang dari 35 dalam seminggu. Pandangan Lincoln Arsyad dalam Suropto (2020) juga membangun pandangan ini, lebih spesifiknya tidak tepat untuk mengharapkan orang yang tidak bekerja itu miskin dan orang yang bekerja seharian itu kaya. Ini karena mereka yang bekerja mungkin tidak bekerja dengan sengaja karena mereka mencari posisi yang lebih baik yang sesuai dengan level, dan ada berbagai aset untuk membantu menangani masalah keuangan, khususnya menolak posisi yang mereka lihat. sebagai biasa-biasa saja.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan estimasi analisis data panel, bahwa Log(x_3) yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Dari konsekuensi upah unik lingkungan yang berdampak buruk pada kemiskinan, hal ini karena cara pembayaran unik provinsi merupakan penanda dalam memperkirakan suatu daerah di mana perluasan gaji unik teritorial akan meningkatkan pembangunan keuangan dan mengurangi kebutuhan. Pendapatan daerah yang tidak penting tersebut disebabkan oleh pengakuan gaji pokok provinsi sebagai perolehan jabatan, yayasan, dan kerangka kerja yang berfokus pada kepentingan umum yang belum seluruhnya diperuntukkan. Penataan yang tidak tepat menyebabkan blunder berkembang atau semakin berkembangnya bantuan pemerintah daerah sehingga pendapatan daerah tidak dapat membantu daerah secara nyata dalam mengurangi kebutuhan. Penelitian ini sesuai dengan penelitian Lista (2001) dengan efek samping eksplorasi bahwa pendapatan lingkungan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Bogor. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian Rahmadeni (2019) bahwa upah yang unik sangat berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Riau.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara parsial Pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.
2. Secara parsial tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara.
3. Secara parsial pendapatan asli daerah tidak

berpengaruh dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

4. Secara simultan variabel pengeluaran pemerintah, tingkat pengangguran terbuka dan pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.
5. Dari hasil Adjusted R-Squared yang menunjukkan hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat yang sangat lemah yang berarti ada beberapa variabel lain diluar penelitian ini.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu:

1. Bagi Pemerintah, strategi pemerintah melalui pendapatan daerah dan penggunaan pemerintah yang terfokus pada bantuan pemerintah daerah harus terus ditingkatkan agar angka kemiskinan terus menurun, seperti menggarap peruntukan tambahan aset tetap.
2. Bagi pejabat publik, dalam penarikan rantai terbuka akan mempengaruhi tingkat kebutuhan, dengan cara ini otoritas publik harus segera membuat strategi dengan mengurangi rantai terbuka, misalnya, memberikan sekolah dan mempersiapkan, memperluas posisi terbuka, menciptakan dan memperluas latihan kepeloporan yang diberikan secara eksplisit dari organisasi. atau sebaliknya yayasan-yayasan yang terkait serta menciptakan usaha-usaha yang imajinatif dan menggarisbawahi industrialisasi di bidang moneter di daerah-daerah pedesaan, perlu mempertahankan satu ton tenaga kerja.
3. Untuk pemeriksaan tambahan, adalah normal bahwa para ilmuwan dapat menambahkan berbagai faktor di luar eksplorasi ini dan menambah jumlah informasi sehingga pemeriksaan lebih baik dan eksplorasi ini menggunakan strategi kekambuhan informasi papan dengan Model Efek Acak sebagai perangkat investigasi. Spesialis masa depan dapat menggunakan strategi terbaru yang sesuai dalam ulasan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldino, M. (2018). Analisis Kemiskinan di Jawa Tengah. *Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Kota Yogyakarta*.
- Andriyani, D., & Nurmauliza. (2018). "Pengaruh Tingkat Pengangguran Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2007-2016." *Jurnal Ekonomi Regional Unimal* 1(1):8-14.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *BPS*. <https://www.bps.go.id/istilah>
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Badan Pusat Statistik*. <https://www.bps.go.id/>
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Indonesia*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/publication>
- Badan Pusat Statistik Sumatera Utara. (2022). *Sumatera Utara Dalam Angka 2022*. <https://sumut.bps.go.id/>
- Baeti, N. (2013). Pengaruh pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah terhadap pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2011. *Economics Development Analysis Journal*.
- Fathurrahman, A. (2012). Kebijakan Fiskal Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*.
- Gujarati, D. N., Porter, D. C., & Gunasekar, S. (2012). *Basic econometrics*. Tata McGraw-Hill Education.
- Idris, I. F. (2016). Potential Increase In Revenue Collection BPHTB Tax District Musi Banyuasin. *European Journal Of Accounting, Auditing And Finance Research*.
- Iqbal, M. (2015). *Regresi Data Panel (2): Tahap Analisis*. Dosen Perbanas, Sarana Tukar Menukar Informasi Dan Pemikiran Dosen <Http://Dosen.Perbanasinstitute.Ac.Id>.
- Jaya, I., & Sunengsih, N. (2009). Kajian Analisis Regresi dengan Data Panel. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian. Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta*.
- Ketaren, I. C. (2018). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Skylandsea*.
- Lista, Sudarmanto, E., & Herlisnawati, D. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan Pemerintah Kabupaten Bogor Periode 2008-2017. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi*.
- Mosal, M. M. (2013). Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Penerapan Akuntansi Di Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4).
- Noviatamara, A., Ardina, T., & Amalia, N. (2019). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*.
- Putri, E. M., & Putri, D. Z. (2021). Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendidikan Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Ecosains: Jurnal Ilmiah*

Ekonomi Dan Pembangunan, 10(2), 106–114.

185.

- Rahmadeni, R. (2019). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Tenaga Kerja dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau. *Jurnal Sains Matematika Dan Statistika*, 5(1).
- Ridho Al Izzati, and D. S. (2020). The Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia. *Bull Indones Econ Stud*. 56(2):175- 192.
- Romi, S., & Umiyati, E. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum terhadap Kemiskinan di Kota Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 7(1), 1–7.
- Silalahi, D. E., & Ginting, R. R. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Untuk Mengatur Penerimaan dan Pengeluaran Negara Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(2), 156–167. <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i2.193>
- Siregar, O. K. (2020). Pengaruh Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 10(1), 88–100.
- Sitaniapessy, H. A. P. (2013). Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap PDRB dan PAD. *Jurnal Economia*, 9(1), 38–51.
- Sukirno, S. (2010). *Makroekonomi. Teori Pengantar* (edisi ke3). PT. Raja Grasindo Perseda.
- Suliswanto, M. S. W. (2010). Pengaruh produk domestik bruto (PDB) dan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap angka kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(2), 357–366.
- Suripto, S., & Subayil, L. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Di Yogyakarta Priode 2010-2017. *GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*.
- Waluyo, D. E. (2014). Pendekatan Struktural, Ekonomi Dan Spasial (Almiral) Sebagai Model Alternatif Penanggulangan Kemiskinan. *Journal of Innovation in Business and Economics*, 4(2), 183. <https://doi.org/10.22219/jibe.vol4.no2.183-192>
- Widarjono, A. (2017). *Ekonometrika pengantar dan aplikasinya disertai panduan Eviews*. STIM YKPN.
- Yacoub, Y. (2012). Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Eksos*, 8, 176–